

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Secara etimologi, konsep manajemen berakar dari berbagai bahasa Eropa, seperti istilah “*manus*”, “*mano*”, hingga “*manage*” yang berasal dari bahasa Latin, Prancis, serta Italia.⁹ Sejalan dengan pandangan Usman secara harfiah kata manajemen merupakan kombinasi dari kata “*manus*” atau tangan dan “*agere*” artinya melakukan, yang jika disatukan membentuk “*managere*” dengan arti menangani atau mengelola suatu hal. Dalam konteks bahasa Inggris istilah tersebut diterjemahkan sebagai kata kerja yaitu “*to manage*” yang berarti mengorganisasi, mengatur, atau mengurus yang kemudian dikenal secara luas sebagai kata “*management*”.¹⁰

Sementara itu George R. Terry merumuskan manajemen sebagai sebuah prosedur spesifik yang mencakup serangkaian aktivitas mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga fungsi pengendalian. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan secara sistematis guna menetapkan sekaligus mewujudkan target yang telah ditentukan

⁹ Rina Murtayaningsih, “Implementasi Manajemen Pendidikan dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam,” *Jurnal Ilmiah Pedagogy* 2, no. 1 (2023).

¹⁰ Irsan Rangkuti dkk., “Strategi Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Meningkatkan Antusiasme Calon Peserta Didik Baru di Sekolah MTsS Nurul Ilmi Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat,” *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2023).

melalui pendayagunaan potensi sumber daya manusia beserta aset pendukung lainnya secara optimal.¹¹

Sedangkan istilah keuangan atau pembiayaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *finance* yang dikaitkan dengan upaya memperoleh atau mengumpulkan modal guna membiayai aktivitas yang dilakukan. Akan tetapi makna keuangan atau modal saat ini menjadi luas tidak hanya sebagai usaha dalam mengumpulkan modal tetapi juga mencakup segi penggunaan modal tersebut. ganti Dalam bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lainnya) sesuatu, ongkos belanja, dan/atau pengeluaran.¹²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan aktivitas mengumpulkan dan mengatur modal yang dimiliki untuk membiayai aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pekontribusi sumber daya manusia beserta aset pendukung lainnya.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

Dalam cakupan dunia pendidikan, alokasi biaya secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yakni biaya langsung (*direct cost*) serta biaya tidak langsung (*indirect cost*). Berdasarkan pemikiran

¹¹ Yunus, Abu Bakar Dja'far, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Prinsip, Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam*, (Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2021) Hlm 4.

¹² Malida, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35931/am.v8i1.3079>.

Nanang Fattah, kedua jenis beban biaya ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Biaya langsung (*Direct cost*).

Merupakan seluruh pengeluaran yang secara riil dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional dalam proses belajar mengajar. Hal ini mencakup pengadaan perlengkapan instruksional, sarana prasarana sekolah, pembayaran honorarium bagi pendidik yang disalurkan oleh pemerintah maupun masyarakat, hingga biaya pendidikan yang ditanggung secara mandiri oleh pihak siswa atau wali murid.

b. Biaya tidak langsung (*Indirect cost*)

Kategori ini merujuk pada biaya kesempatan atau potensi keuntungan ekonomis yang hilang karena siswa memilih untuk menempuh pendidikan formal. Contohnya adalah waktu produktif yang dikorbankan oleh peserta didik selama masa studi, biaya transportasi menuju sekolah, hingga pengeluaran harian lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kurikulum sekolah.¹³

3. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Aktivitas sekolah atau madrasah yang membutuhkan pendanaan dapat direncanakan, diupayakan, dibukukan secara transparan dan dapat digunakan untuk membiayai program sekolah secara efektif dan efisien

¹³ Nanang Fattah Op. Cit., Hlm 23.

melalui aktivitas manajemen pembiayaan. Dengan demikian tujuan manajemen pembiayaan, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan sekolah atau madrasah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah atau madrasah.
- c. Meminimalisir penyalahgunaan keuangan sekolah atau madrasah.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka kepala sekolah atau madrasah harus kreatif dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang mumpuni dalam hal pembukuan, pertanggungjawaban, dan mekontribusikannya secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁴

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan atau keuangan sekolah atau madrasah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.¹⁵

a. Keadilan

Prinsip keadilan dalam manajemen pembiayaan berarti harus terdapat keseimbangan yang tercipta dengan adil antara individu dan

¹⁴ Alfi Zahrotul Hamidah, "Konsep dan Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah," 02 Juli-Desember 8, no. 02 (2022), <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin>.

¹⁵ Muhammad Yusuf, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i1.13369>.

masyarakat. Artinya, anggaran yang direncanakan digunakan secara merata untuk kepentingan seluruh anggota komunitas sekolah.¹⁶

b. Efisiensi

Konsep efisiensi pada dasarnya merepresentasikan korelasi antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan hasil yang dicapai (*output*). Dalam ranah pendidikan, efisiensi berkaitan erat dengan optimalisasi penggunaan aset serta dana pendidikan yang serba terbatas guna mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁷

Sebuah aktivitas manajerial dapat dikategorikan efisien apabila penggunaan instrumen seperti waktu, tenaga, maupun biaya yang minimal mampu menghasilkan capaian yang lebih besar, baik secara kualitas maupun kuantitas.¹⁸

c. Transparansi

Secara harfiah, transparansi bermakna adanya keterbukaan. Dalam konteks tata kelola lembaga pendidikan, transparansi keuangan berarti adanya kejujuran dan keterbukaan mengenai asal-usul sumber dana, jumlah yang diterima, hingga rincian penggunaan dan laporan pertanggungjawaban yang gamblang. Adanya transparansi ini sangat krusial agar para pemangku kepentingan

¹⁶ Sri Melisawati Makmur Syukri, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar," preprint, Zenodo, 30 September 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13932587>.

¹⁷ Nanang Fattah, Op. Cit., Hlm 35.

¹⁸ Andi Aslindah dan Widyatmike Gede Mulawarman, "Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN)* 2, no. 2 (2022): 65–74, <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>.

(stakeholders) dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana dikelola oleh pihak sekolah atau madrasah.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam manajemen finansial sekolah merujuk pada kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana. Setiap pengeluaran kas di lembaga pendidikan hendaknya dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya serta tidak menyimpang dari regulasi hukum yang berlaku.¹⁹

e. Efektivitas

Prinsip efektivitas juga menjadi pilar yang harus ditekankan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan madrasah. Efektivitas sering kali didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, manajemen keuangan dikatakan efektif apabila dana yang dialokasikan benar-benar mampu mewujudkan visi dan misi program yang telah direncanakan di awal tahun ajaran.²⁰

Pada konteks manajemen keuangan, efektivitas dapat dicapai apabila keuangan yang telah diatur mampu membiayai aktivitas-aktivitas pada aktivitas yang diselenggarakan untuk

¹⁹ Muhlil Musolin dkk., "Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo," *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2021): 147–66, <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.175>.

²⁰ Malida, Op.Cit., Hlm 320.

mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan *outcomes*-nya dalam perencanaan.²¹

5. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Sumber pembiayaan sekolah terutama untuk sekolah negeri pada umumnya mendapatkan dana rutin berupa gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas (OPF) dari pemerintah. Selain itu juga mendapatkan dana dari masyarakat baik itu dari orang tua siswa atau dana sumbangan dari dunia usaha.

Dana dan kepercayaan merupakan dua hal yang berkaitan. Apabila sekolah menginginkan adanya dukungan dana dari masyarakat maka program yang dibuat haruslah menarik, bagus, memiliki kontribusi luas dan dapat dijalankan dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pimpinan sekolah untuk mendapatkan dukungan dana dari donatur sekolah, antara lain:

- a. Melakukan pendekatan kepada calon donatur.
- b. Meminta saran atau pendapat tentang program yang diajukan dalam proposal.
- c. Menjelaskan dan meyakinkan bahwa program yang diajukan memberikan kontribusi yang banyak.
- d. Meyakinkan bahwa sekolah akan menggunakan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipercaya.

Menurut Nanang Fattah sumber-sumber pembiayaan sekolah berasal dari: pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok

²¹ Atep Ruzhan Nur Alam Ende Widiyana, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Mts Al-Barkah Cianjur, 30 September 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13867430>.

masyarakat, orang tua, dunia usaha atau industri, swasta, alumni dan lainnya.²²

6. Tahapan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan biaya dalam lembaga pendidikan melalui tiga tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penganggaran (*Budgeting*)

1) Pengertian Penganggaran

Penganggaran merupakan aktivitas atau proses menyusun anggaran (*budget*). *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas lembaga dalam kurun waktu tertentu. Menurut Nanang Fatah penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menentukan besarnya biaya yang akan dialokasikan dengan merundingkan kepada pimpinan teratas dan bawahannya. Sehingga secara konsep dan praktiknya alokasi dan penganggaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.²³

2) Karakteristik Penganggaran

Menurut Nanang Fatah anggaran memiliki dua karakteristik yaitu dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

²² Nanang Fattah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*, 1 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) Hlm 47.

²³ Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, 6 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) Hlm 48.

Dari sisi penerimaan menggambarkan besarnya biaya yang diterima oleh lembaga yang dapat dibedakan dari dana pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber lainnya.²⁴

3) Fungsi Penganggaran

Menurut Nanang Fattah penganggaran dalam manajemen selain sebagai alat dalam melakukan perencanaan dan pengendalian tetapi juga berfungsi untuk suatu lembaga dalam menentukan posisinya. Sehingga anggaran berkontribusi untuk antara lain:

- a) Sebagai alat penganggaran.
- b) Sebagai alat kontrol pengeluaran dana.
- c) Sebagai alat efisiensi.²⁵

4) Prinsip-Prinsip Penganggaran

Kriteria anggaran yang kredibel menurut Nanang Fattah mencakup beberapa aspek krusial, antara lain:

a) Delegasi tugas

Adanya delegasi tugas dan wewenang untuk setiap individu dalam bentuk deskripsi yang terperinci.

b) Standar akuntansi

Tersedianya mekanisme pencatatan keuangan yang mumpuni sebagai instrumen dalam mengimplementasikan anggaran.

c) Evaluasi kinerja

²⁴ Ibid, Hlm 48.

²⁵ Ibid, Hlm 49.

Adanya peninjauan dan pemantauan secara berkala guna mengukur efektivitas organisasi.

d) Dukungan manajerial

Terjalannya komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga staf di tingkat operasional.²⁶

5) Prosedur Penganggaran

Menurut Nanang Fatah dalam merumuskan anggaran, langkah-langkah yang hendaknya ditempuh antara lain:

- a) Menginventarisasi seluruh program kerja yang direncanakan untuk satu periode ke depan.
- b) Menghitung ketersediaan modal, baik yang berupa dana tunai, kontribusi layanan, maupun aset fisik.
- c) Mengonversikan seluruh sumber daya ke dalam satuan mata uang, karena pada hakikatnya anggaran merupakan proyeksi keuangan..
- d) Menyusun rincian biaya ke dalam format baku yang telah disepakati untuk digunakan oleh instansi terkait.
- e) Menyusun anggaran yang diusulkan supaya pihak yang berwenang menyetujui.
- f) Merevisi anggaran yang diusulkan.
- g) Menyetujui revisi anggaran yang diusulkan.
- h) Mengesahkan anggaran.²⁷

6) Model Perencanaan Anggaran

²⁶ Ibid, Hlm 49.

²⁷ Ibid, Hlm 50.

Mengacu pada pemikiran Nanang Fattah, lembaga pendidikan setidaknya dapat menerapkan empat variasi dalam menyusun rencana anggaran antara lain:

a) Anggaran Berbasis POS (*Line Item Budget*)

Merupakan teknik penyusunan anggaran yang menitikberatkan pada pengelompokan biaya ke dalam kategori-kategori spesifik, upah kerja, honorarium hingga biaya operasional yang disatukan dalam unit atau nomor rekening pengeluaran tertentu.

b) Anggaran Berbasis Program (*Program Budget System*)

Skema ini dirancang sedemikian rupa agar alokasi biaya pada setiap aktivitas atau program sekolah dapat dikenali dan dipantau dengan jelas.

c) Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budget*)

Berbeda dengan model sebelumnya, sistem ini lebih menekankan pada pencapaian kerja yang dihasilkan, daripada sekedar memerinci rincian alokasi dana secara mendalam.

d) Sistem Penyusunan Program dan Penganggaran (*Planing Programming Budgeting System*)

Model ini berfungsi sebagai kerangka kerja strategis yang mengintegrasikan informasi secara sistematis. Setiap rencana kerja jangka panjang maupun pendek dipaparkan secara gamblang. Di dalamnya mencakup rincian biaya,

proyeksi keuntungan, hingga analisis kelayakan guna menentukan prioritas program yang paling memberikan kontribusi bagi lembaga.²⁸

b. Pelaksanaan (*Accounting*)

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nanang Fattah, fase pelaksanaan keuangan sekolah mencakup dua dimensi utama, yakni manajemen penerimaan serta manajemen pengeluaran.

1) Penerimaan anggaran

Definisi dari pos penerimaan ini adalah seluruh pendapatan yang dikumpulkan oleh pihak sekolah selama satu periode tahun ajaran. Sumber pendapatan ini berasal dari berbagai jalur pendanaan formal yang diterima secara konsisten dan terencana.

2) Pengeluaran anggaran

Sedangkan pengeluaran anggaran adalah aktivitas menggunakan sejumlah uang yang dibelanjakan setiap tahunnya guna memenuhi kepentingan sekolah dalam pelaksanaannya.

Keduanya merupakan komponen utama yang menggerakkan aktivitas lembaga. Dalam tahap pelaksanaan anggaran penerimaan berfungsi sebagai pedoman madrasah guna menghimpun dana dari masyarakat atau orang tua. Disamping itu, anggaran pengeluaran dapat digunakan oleh

²⁸ Ibid, Hlm 43.

sekolah atau madrasah untuk memenuhi kebutuhan atau fasilitas peserta didik.²⁹

Selain itu, menurut Mulyasa juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan keuangan di sekolah atau madrasah secara garis besar terbagi menjadi dua aktivitas yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan menurutnya adalah menerima sejumlah dana dari berbagai sumber dana kemudian dibukukan sesuai dengan prosedur yang sesuai dan telah disepakati.³⁰

c. Pengawasan (*Auditing*)

Auditing merupakan proses mencocokkan antara kenyataan di lapangan dengan laporan tertulis dengan cara mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti laporan keuangan suatu lembaga.³¹ Menurut Nanang Fattah dalam pengawasan terdapat tiga aktivitas pokok yakni:

- 1) Memantau (*monitoring*)
- 2) Menilai
- 3) Melaporkan hasil yang ditemukan.³²

B. Konsep Program Layanan Kelas Unggulan di Sekolah

1. Pengertian Program Layanan Kelas Unggulan di Sekolah

Konsep program merujuk pada rancangan dasar mengenai fondasi dan langkah-langkah kerja yang akan ditempuh, sebagaimana

²⁹ Ibid, Hlm 23.

³⁰ Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, 1 ed. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), Hlm 113.

³¹ Nanang Fattah, Op. Cit., Hlm 115.

³² Nanang Fattah, Op.Cit., Hlm 66.

tercantum dalam KBBI. Dalam konteks pendidikan, Aripin Silalahi menegaskan bahwa eksistensi kelas unggulan bertujuan untuk mewadahi siswa-siswi berbakat. Kelas ini dirancang sedemikian rupa agar kecerdasan serta daya cipta siswa dapat berkembang optimal melalui tawaran program-program yang spesifik dan berkualitas.³³

Kemudian menurut Amin Mudi Utomo beliau yang mendefinisikan kelas unggulan sebagai kelas yang didalamnya berisi peserta didik dengan kriteria yang beragam yang dijaring berdasarkan dari IQ, potensi akademiknya, dan prestasi akademik yang dimilikinya yang sangat wajar dimana pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan output yang berkualitas pula.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program layanan kelas unggulan merupakan rancangan program yang berusaha dijalankan untuk siswa yang memiliki bakat, kreativitas, dan kecerdasan yang dimilikinya dengan memberikan pembelajaran yang berkualitas sehingga akan menghasilkan *output* yang berkualitas pula.

2. Landasan Yuridis Layanan Kelas Unggulan

Implementasi program kelas unggulan di lembaga pendidikan memiliki pijakan regulasi yang kuat dan saling berkaitan satu sama lain. Secara hierarkis, kebijakan ini berpedoman pada Undang-Undang

³³ Zayyini Rusyda Mustarsyidah, Manajemen Program Kelas Unggulan Untuk Meningkatkan Daya Saing MTsN 1 Dan MTsN 2 Ponorogo, *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, vol. 2, no. 02 (2022): 137–52, <https://doi.org/10.21154/excelencia.v2i02.1229>.

³⁴ Muhammad Irfan Fauzi, “Program Layanan Kelas Unggulan Sebagai Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Prestasi Dan Positive Image,” *JURMA: Jurnal Riset Manajemen* 2, no. 1 (2024): 206–23, <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i1.1205>.

Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum utama di Indonesia.

Hal tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kriteria mutu minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Secara lebih spesifik, upaya pembinaan terhadap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa atau bakat khusus diatur di dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006.

Selain itu, terdapat rujukan administratif lainnya seperti Keputusan Mendikbud Nomor 0487/U/1992 serta pedoman teknis dari Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 yang memfokuskan pada penjaminan mutu sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan program bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Melalui rangkaian regulasi tersebut, sekolah memiliki legitimasi yang sah dalam mengelola program unggulan guna mengoptimalkan potensi intelektual peserta didiknya secara formal dan terukur.³⁵

3. Tujuan Penyelenggaraan Program Layanan Kelas Unggulan

Menurut pandangan Qomarudin, pembentukan kelas unggulan di lingkungan sekolah maupun madrasah diarahkan untuk mencapai sejumlah target strategis sebagai berikut:

a. Penyeragaman Kualitas Intelektual dan Karakter.

³⁵ Nur Arifah Dzul Qo'dah, Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam Mengembangkan Program Kelas Unggulan dan Citra Madrasah di MTs Mambaus Sholihin, Ulul Amri: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2 (2022): 98–111.

Menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara kognitif, namun juga memiliki integritas moral, ketakwaan yang kuat kepada Allah SWT, serta dibekali dengan wawasan pengetahuan dan keahlian yang luas.

b. Akselerasi Pengembangan Potensi Khusus.

Membuka peluang seluas-luasnya bagi siswa dengan tingkat kecerdasan istimewa agar dapat mengembangkan minat serta bakat mereka secara lebih cepat melalui penyediaan layanan pendidikan yang bersifat khusus.

c. Optimalisasi Penguasaan Kurikulum

Memberikan dukungan penuh kepada peserta didik agar mampu mendalami serta menguasai seluruh materi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan lembaga.

d. Pencetakan Lulusan yang Kompetitif:

Membentuk profil lulusan yang memiliki daya saing tinggi, berkarakter mulia, serta memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan tahap perkembangan usianya.

e. Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul

Melahirkan profil SDM yang berprestasi, kompeten di bidangnya, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

³⁶ Irfana Nurul Laili dkk., "Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Program Unggulan Non Akademik Di Sdit Firdaus Mojosari Mojokerto," 2022, *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, vol. 8 (16 April), <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3223>.

4. Karakteristik Program Layanan Kelas Unggulan

Karakteristik yang dimiliki pada kelas unggulan diantaranya:

- a. Siswa diinput melalui seleksi dan tes yang ketat.
- b. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai.
- c. Memiliki lingkungan belajar yang relatif kondusif.
- d. Memiliki kepala sekolah, tendik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif.
- e. Kurikulum yang digunakan telah dikembangkan dan di inovasi.
- f. Memiliki waktu pembelajaran yang lebih lama dibandingkan dengan kelas reguler.
- g. Memiliki kualitas pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. Terdapat tambahan aktivitas di luar jam kurikulum.³⁷

³⁷Nur Arifah Dzul Qo'dah, Op. Cit., Hlm 102-103.